

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan sistem akuntansi aset di BKAD Provinsi Sumatera Utara cukup efektif, terbukti dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didukung dengan inovasi aplikasi SI ANAK DARA yang memudahkan BKAD Provinsi Sumatera Utara dalam mengatur dan menyajikan laporan aset yang efektif. Definisi aset tetap menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pencatatan Barang Milik Daerah merupakan bagian penting bagi pencatatan keuangan daerah karena ini merupakan salah satu kekayaan daerah yang memiliki nilai akuntansi bagi daerah. Pada umumnya nilai aset tetap daerah paling besar dibandingkan akun lain pada laporan keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
2. Penerapan Prosedur di BKAD terdiri dari siklus pengelolaan aset tetap yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan barang milik daerah oleh BKAD, barang milik daerah berupa rumah daerah, ganti rugi dan saksi dan sengketa barang milik daerah. Penggunaan Barang Milik Daerah di BKAD Provinsi Sumut diatur dalam pasal 18 tentang Barang milik Daerah yang berisi perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan BMD yang ada dan ketersediaan yang dimaksud disini yang

ada pada pengelola barang atau penggunaan barang serta harus mencerminkan kebutuhan riil BMD pada OPD sehingga menjadi dasar kebutuhan BMD. Penerapan prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, serta perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan penerimaan sesuai dengan prosedur kemudian barang yang diterima disimpan ditempat penyimpanan sebelum barang disalurkan kepada unit- unit organisasi.

3. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap Salah satunya dipergunakan dalam menjalankan operasional kinerja untuk tata kelola BKAD Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan sistem aplikasi. Sangat membantu dalam menyajikan laporan aset tetap dan juga didukung dengan sistem pengendalian internal dan pegawai yang ahli dan kompeten dibidangnya. Dan juga pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada peraturan daerah nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

## **B. Saran**

Berdasarkan Hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dikemukakan yaitu: Untuk meningkatkan kinerja Pegawai dimasa yang akan datang maka BKAD Provsu agar memiliki teknologi dan sistem yang lebih baik lagi agar sistem dan prosedur aset berjalan efektif maka penulis menyarankan:

### **1. Bagi Instansi**

Sistem dan prosedur aset juga dijaga agar tidak terjadi kecurangan selama pemeriksaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumut telah menerapkan sistem dan prosedur aset yang harus dijaga dan jika memungkinkan, ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan operasi instansi.

## 2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN